

DINAMIKA PANCASILADAN UUD 1945 DALAM KURUN WAKTU ORDE LAMA DAN ORDE BARU: STUDI HISTORIS TERHADAP IMPLEMENTASI IDEOLOGI DAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Putri Dwi Lestari¹, Kartini²

putridwilestari444@gmail.com¹, kartinisikumbang@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Sebagai dasar negara dan konstitusi, keduanya memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan. Pada masa Orde Lama, Pancasila dijadikan simbol perjuangan nasional dan UUD 1945 diterapkan secara fleksibel untuk mengakomodasi kondisi politik yang tidak stabil. Sebaliknya, pada masa Orde Baru, Pancasila diformalkan sebagai doktrin negara dan dijadikan alat legitimasi kekuasaan, sementara UUD 1945 dipertahankan tanpa perubahan demi stabilitas politik. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, penelitian ini menganalisis hubungan antara ideologi, konstitusi, dan praktik pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal dan implementasi nyata, yang sering kali menyimpang dari prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam dan pelaksanaan yang konsisten agar Pancasila dan UUD 1945 benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Pancasila, UUD 1945, Orde Lama, Orde Baru, Demokrasi, Keadilan Sosial.

ABSTRACT

This study explores the dynamics of the implementation of Pancasila and the 1945 Constitution (UUD 1945) during the Old Order and New Order periods in Indonesia. As the state ideology and constitution, both played a vital role in shaping governmental policies. In the Old Order era, Pancasila was used as a symbol of national struggle, while the Constitution was applied flexibly to accommodate political instability. In contrast, during the New Order, Pancasila was formalized as a state doctrine and became a tool for legitimizing power, while the Constitution remained unchanged to maintain political control. Using a qualitative descriptive approach through literature study, this research analyzes the relationship between ideology, the constitution, and governance practices. The findings reveal a gap between ideal values and practical implementation, which often deviated from democratic principles and social justice. Therefore, a deeper understanding and consistent application are essential to ensure that Pancasila and the 1945 Constitution serve as true foundations for the nation.

Keywords: Pancasila, 1945 Constitution, Old Order, New Order, Democracy, Social Justice.

PENDAHULUAN

Pancasila dan UUD 1945 tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menjadi panduan normatif dalam mengarahkan jalannya pemerintahan, perumusan kebijakan publik, serta pembentukan karakter bangsa. Namun, penerapannya dalam praktik kenegaraan tidak selalu konsisten dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Khususnya dalam dua masa pemerintahan yang dominan dalam sejarah Indonesia modern Orde Lama dan Orde Baru, Pancasila dan UUD 1945 mengalami dinamika interpretasi dan implementasi yang sangat kompleks.

Pada masa Orde Lama, Pancasila diposisikan sebagai simbol perjuangan nasional dalam melawan kolonialisme dan sebagai landasan ideologis untuk membangun identitas kebangsaan. Namun dalam praktiknya, Pancasila kerap kali dimanipulasi untuk memperkuat legitimasi kekuasaan eksekutif yang semakin terpusat. UUD 1945 yang seharusnya menjadi

alat untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan justru mengalami penyimpangan melalui kebijakan-kebijakan politik seperti Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Masa ini ditandai oleh berkembangnya sistem Demokrasi Terpimpin yang mengaburkan batas antara kekuasaan dan hukum, serta membatasi kebebasan sipil dan politik rakyat.

Sementara itu, pada masa Orde Baru, Pancasila secara formal dijadikan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dikenal dengan istilah “asas tunggal.” UUD 1945 dipertahankan secara kaku tanpa perubahan berarti selama lebih dari tiga dekade, sekalipun terdapat kebutuhan mendesak untuk penyesuaian terhadap dinamika sosial-politik. Penggunaan ideologi dan konstitusi negara selama Orde Baru menunjukkan adanya jarak yang besar antara nilai ideal dan realitas pelaksanaan, khususnya dalam aspek demokrasi, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pancasila dan UUD 1945 memiliki kedudukan tinggi secara hukum dan moral dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, implementasinya sangat bergantung pada kepemimpinan politik dan konfigurasi kekuasaan yang dominan pada masing-masing periode. Dalam konteks inilah, penelitian ini menjadi relevan untuk menggali dinamika pancasila dan UUD 1945 dalam kurun waktu orde lama dan orde baru dengan studi historis terhadap implementasi ideologi dan konstitusi di Indonesia.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis, tetapi juga untuk menganalisis secara kritis hubungan antara ideologi negara, sistem konstitusi, dan praktik pemerintahan dalam dua era berbeda tersebut. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, kajian ini bertujuan mengevaluasi kesenjangan antara nilai-nilai normatif yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan implementasi aktualnya dalam kebijakan politik, ekonomi, dan sosial.

Melalui pemahaman historis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kembali strategi implementasi Pancasila dan UUD 1945 secara lebih kontekstual, adil, dan demokratis dalam menghadapi tantangan kebangsaan di era kontemporer. Dengan demikian, nilai-nilai dasar negara tidak hanya berhenti sebagai simbol, tetapi menjadi pedoman nyata yang mengakar dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam dua periode pemerintahan, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik masalah yang bersifat konseptual, historis, dan interpretatif. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengkaji makna, nilai, dan praktik ideologis yang diterapkan dalam konteks sosial-politik yang kompleks.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), di mana data dan informasi dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis yang relevan. Sumber utama penelitian terdiri atas jurnal ilmiah nasional, buku-buku akademik, serta literatur historis yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, dan praktik ketatanegaraan di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pemilihan jurnal dan buku didasarkan pada relevansi isi, otoritas penulis, serta keterkaitan langsung dengan isu yang dikaji, seperti politik hukum, sejarah konstitusi, ideologi negara, dan hak asasi manusia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif analitik, dengan menelaah isi dan gagasan yang terkandung dalam setiap sumber, kemudian menghubungkannya secara tematik

untuk melihat pola-pola pemikiran dan perbedaan implementasi antar periode. Peneliti juga menggunakan metode analisis historis, yaitu dengan merekonstruksi peristiwa-peristiwa politik dan kebijakan pemerintahan yang relevan dalam kaitannya dengan penggunaan Pancasila dan UUD 1945, serta mengevaluasi pergeseran makna yang terjadi dari waktu ke waktu. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana ideologi negara dan konstitusi digunakan sebagai dasar kebijakan, dan sejauh mana penerapannya sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, penelitian ini bersifat reflektif, tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi juga mengkaji secara kritis relevansi dan konsistensi antara nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan praktik pemerintahan pada dua masa yang berbeda. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ideologi dan ketatanegaraan di Indonesia, serta menjadi bahan evaluasi untuk penguatan nilai-nilai dasar negara dalam pemerintahan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pancasila terhadap Kebijakan Pemerintahan di Dua Periode

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pemerintahan, terutama pada era Orde Lama dan Orde Baru. Pada Orde Lama, Pancasila diinterpretasikan sebagai landasan ideologis yang kuat untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Dalam konteks ini, pemerintah berusaha menanamkan semangat nasionalisme yang tinggi di kalangan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang diambil cenderung mengedepankan persatuan bangsa dan gotong royong, yang merupakan nilai-nilai dasar Pancasila. Namun, meskipun semangat nasionalisme dan keadilan sosial ditekankan, praktik pemerintahan pada masa ini tidak selalu mencerminkan nilai-nilai tersebut. Banyak kebijakan yang cenderung mengarah kepada otoritarianisme, di mana kritik terhadap pemerintah seringkali diabaikan. Dalam banyak kasus, tindakan represif terhadap oposisi menjadi hal yang biasa. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi Pancasila pada masa itu sering kali dimanipulasi untuk mempertahankan kekuasaan.

Di sisi lain, Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memberikan interpretasi yang berbeda terhadap Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila dijadikan alat legitimasi bagi kekuasaan. Soeharto dan rezimnya berusaha menampilkan diri sebagai penjaga Pancasila, dengan mengklaim bahwa semua kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan bangsa. Kebijakan ekonomi dan pembangunan menjadi fokus utama, dengan Pancasila sebagai landasan moral yang mendasari setiap langkah pemerintah. Meskipun ada upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, penegakan hak asasi manusia pada periode ini sering terabaikan. Kritik terhadap pemerintah dibungkam, dan kebebasan berpendapat menjadi sangat terbatas. Dalam praktiknya, Pancasila lebih sering dipandang sebagai slogan daripada sebagai panduan yang mendalam untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini menciptakan kesenjangan antara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan realitas sosial yang terjadi.

Kebijakan luar negeri pada kedua periode tersebut juga sangat dipengaruhi oleh Pancasila. Pada Orde Lama, Indonesia berupaya untuk menjalin hubungan dengan negara-negara non-blok. Dalam konteks ini, Pancasila digunakan untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap anti-kolonialisme dan solidaritas dengan bangsa-bangsa yang sedang berjuang untuk merdeka. Namun, pada Orde Baru, fokus lebih kepada stabilitas politik dan kemitraan strategis dengan negara-negara Barat, dengan Pancasila sebagai latar belakang moral. Pengaruh Pancasila dalam kebijakan luar negeri juga terlihat dari sikap anti-kolonial yang diusung. Meskipun kedua periode memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya tetap mewarisi semangat Pancasila sebagai alat untuk menunjukkan identitas

nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila memiliki nilai-nilai yang universal, implementasinya sangat bergantung pada kondisi politik dan kepemimpinan saat itu.

Dalam kedua periode, terlihat bagaimana Pancasila dapat dimanipulasi untuk mendukung kepentingan kekuasaan. Interpretasi yang berbeda terhadap Pancasila menciptakan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Masyarakat seringkali menjadi korban dari kebijakan yang tidak pro-rakyat, di mana hak-hak mereka sering kali diabaikan demi kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, tantangan dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara yang adil dan makmur juga sangat nyata. Meskipun Pancasila bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, banyak aspek yang masih perlu diperbaiki. Ketidakadilan Sosial, kesenjangan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi masalah yang terus menghantui bangsa ini. Pancasila seharusnya menjadi pedoman untuk mengatasi masalah-masalah ini, namun realitas sering kali berbicara sebaliknya.

Secara keseluruhan, pengaruh Pancasila terhadap kebijakan pemerintahan menunjukkan dinamika yang kompleks. Dalam konteks Orde Lama, Pancasila berperan dalam memperkuat identitas nasional dan semangat kolektivitas. Sebaliknya, pada Orde Baru, Pancasila lebih berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan, yang seringkali disalahgunakan untuk menindas oposisi dan mengabaikan hak-hak rakyat. Kedua periode tersebut menjadi contoh bagaimana ideologi dapat dimanfaatkan dalam politik. Pancasila, yang seharusnya menjadi pedoman moral dan etika, sering kali digunakan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya sendiri. Hal ini menciptakan kesenjangan antara idealisme Pancasila dan realitas politik yang ada. Melihat kembali perjalanan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia, penting untuk terus mengingat nilai-nilai dasarnya. Pancasila harus dipahami bukan hanya sebagai slogan politik, tetapi sebagai panduan untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, untuk menjalankan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten. Dalam era modern ini, tantangan baru pun muncul yang memerlukan refleksi terhadap Pancasila. Isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik sosial semakin menuntut perhatian. Pancasila dapat menjadi landasan untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan inklusif, yang mengedepankan kepentingan rakyat dan lingkungan.

Dengan demikian, pengaruh Pancasila dalam kebijakan pemerintahan Indonesia harus selalu ditinjau kembali dan diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Pancasila tidak boleh terjebak dalam dogma, tetapi harus mampu beradaptasi dan memberikan jawaban atas tantangan-tantangan baru yang dihadapi bangsa. Hanya dengan demikian, Pancasila dapat kembali berfungsi sebagai ideologi yang mempersatukan dan memberdayakan seluruh rakyat Indonesia.

Perubahan UUD 1945 Selama Orde Lama dan Orde Baru

UUD 1945, sebagai dasar hukum negara Indonesia, telah mengalami transformasi signifikan sejak awal berdirinya Republik. Pada masa Orde Lama, interpretasi konstitusi cenderung fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan politik saat itu. Presiden Soekarno memainkan peran sentral dalam penafsiran ini, menggunakan UUD 1945 untuk memperkuat kekuasaannya. Hal ini menciptakan kesan bahwa konstitusi dapat dimodifikasi sesuai dengan agenda politik pemimpin. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi titik balik penting dalam sejarah UUD 1945. Keputusan tersebut membubarkan konstituante yang sedang merumuskan konstitusi baru dan mengembalikan kekuasaan UUD 1945. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik dan kegagalan mencapai konsensus dalam penyusunan konstitusi baru.

Dengan langkah tersebut, Soekarno berusaha menegakkan kembali kekuasaan eksekutifnya dan mengatasi krisis politik yang melanda.

Di sisi lain, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto membawa pendekatan yang lebih formal terhadap UUD 1945. Meskipun diawalinya pemerintahan Soeharto tidak ada perubahan substansial pada konstitusi, namun dinamika politik yang terus berubah mendorong perlunya amandemen. Seiring berjalannya waktu, terutama pada tahun 1998, UUD 1945 mulai mengalami perubahan yang signifikan. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam beberapa tahap mencerminkan keinginan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Salah satu perubahan utama adalah pembatasan kekuasaan eksekutif, yang sebelumnya terkesan absolut di bawah kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan kekuasaan yang telah terjadi. Penguatan peran legislatif dan yudikatif juga menjadi fokus dalam amandemen. Dengan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada lembaga-lembaga tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Perubahan ini mencerminkan aspirasi masyarakat untuk memiliki kontrol lebih besar terhadap pemerintah dan untuk memastikan akuntabilitas.

Selain itu, amandemen juga menambahkan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hak-hak individu menunjukkan kemajuan dalam berpikir tentang perlindungan hukum bagi warga negara. Ini adalah langkah penting dalam membangun negara hukum yang menghargai martabat manusia. Meskipun telah ada perubahan yang signifikan dalam teks UUD 1945, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Banyak kebijakan eksekutif yang masih mengedepankan kekuasaan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Praktik politik yang mengedepankan kepentingan kelompok terkadang mengabaikan nilai-nilai konstitusi.

Selain itu, meskipun pemilihan umum menjadi lebih bebas dan terbuka, integritas dalam proses pemilu masih menjadi masalah. Kecurangan, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilihan umum sering kali mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Hal ini menghambat partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan. UUD 1945 pasca-amandemen juga mencerminkan aspirasi masyarakat yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Dengan adanya mekanisme pemilihan yang lebih transparan, masyarakat diberikan peluang untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Namun, tantangan dalam hal akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi perhatian utama.

Dalam konteks yang lebih luas, perubahan UUD 1945 selama Orde Lama dan Orde Baru mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang. Setiap perubahan yang terjadi mencerminkan respon terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah dan tantangan yang dihadapi. Meskipun ada kemajuan dalam hal demokrasi, proses implementasi nilai-nilai konstitusi masih memerlukan perhatian serius. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah salah satu indikator keberhasilan demokrasi. UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang memungkinkan partisipasi tersebut, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen semua pihak untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Tanpa partisipasi aktif, perubahan yang telah dilakukan bisa sia-sia. Melihat ke depan, penting untuk terus memperkuat pendidikan politik di kalangan masyarakat. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara harus ditingkatkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

Selain itu, peran media juga sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Media yang bebas dan independen dapat berfungsi sebagai pengawas yang efektif terhadap tindakan pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat

memperoleh informasi yang akurat dan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Meskipun terdapat kemajuan, tantangan dalam implementasi UUD 1945 tetap ada. Penegakan hukum yang lemah dan praktik korupsi yang masih terjadi menghalangi pencapaian tujuan demokrasi. Oleh karena itu, upaya kolektif diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan yang telah dilakukan dapat direalisasikan secara efektif.

Secara keseluruhan, perjalanan UUD 1945 dari Orde Lama ke Orde Baru adalah cerminan dari perjalanan bangsa Indonesia menuju demokrasi yang lebih matang. Meskipun banyak hal telah dicapai, perjalanan ini masih panjang. Komitmen semua elemen masyarakat, pemerintah, dan lembaga hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita konstitusi. Dengan demikian, UUD 1945 bukan hanya sekedar teks hukum, tetapi juga simbol dari perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Perubahan yang terjadi harus terus dipelihara dan dikembangkan agar konstitusi dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama.

Interpretasi Pancasila dalam Konteks Politik dan Sosial Masing-Masing Periode

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki makna yang mendalam dan kompleks, terutama dalam konteks politik dan sosial di Indonesia. Pada masa Orde Lama, Pancasila tidak hanya sekedar sebagai ideologi negara, melainkan juga sebagai simbol perjuangan melawan kolonialisme. Dalam periode ini, nilai-nilai Pancasila diinterpretasikan dalam kerangka nasionalisme yang kuat, di mana rakyat Indonesia bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Nasionalisme ini dipadukan dengan semangat solidaritas di antara rakyat, menciptakan harapan akan keadilan sosial bagi semua. Namun, meskipun semangat perjuangan ini mengedepankan nilai-nilai Pancasila, praktik politik yang terjadi sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno, meskipun berusaha memperjuangkan kepentingan rakyat, sering kali menekan kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman, dan banyak suara yang menentang kebijakan pemerintah dibungkam. Hal ini menciptakan ketegangan antara cita-cita Pancasila dan kenyataan politik yang otoriter.

Dalam konteks sosial, terdapat upaya untuk memajukan kesejahteraan rakyat, namun hasilnya tidak selalu sejalan dengan harapan. Kesenjangan sosial tetap ada, dan banyak rakyat yang merasa tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan yang ada. Meskipun ada program pemberdayaan dan redistribusi kekayaan, implementasinya seringkali tidak merata, menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa nilai-nilai Pancasila, yang menjanjikan keadilan sosial, tidak sepenuhnya terwujud.

Memasuki Orde Baru, interpretasi Pancasila mengalami pergeseran yang signifikan. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Pancasila mulai diposisikan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dalam konteks ini, Pancasila digunakan untuk menegakkan stabilitas politik dan ekonomi. Meskipun pemerintah berupaya mempromosikan nilai-nilai Pancasila, praktik yang diterapkan sering kali mengabaikan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Pancasila, yang seharusnya menjadi pedoman moral, lebih sering dimanfaatkan sebagai pembenaran bagi tindakan pemerintah. Pemerintah Orde Baru mengajak masyarakat untuk memahami Pancasila sebagai dasar moral, namun dalam banyak kasus, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diabaikan. Tindakan represif terhadap oposisi semakin meningkat, dan kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Pancasila itu sendiri. Dalam situasi ini, Pancasila menjadi alat untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berorganisasi, menciptakan suasana yang menakutkan bagi mereka yang ingin menyuarakan pendapat kritis.

Kedua periode ini menunjukkan bagaimana ideologi, dalam hal ini Pancasila, dapat dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Meskipun Pancasila seharusnya berfungsi sebagai pengikat dan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia, kenyataannya sering kali mengalami distorsi. Praktik politik yang otoriter dan tindakan represif membuat nilai-nilai Pancasila terabaikan, menciptakan jurang antara prinsip dan praktik.

Interpretasi Pancasila pada Orde Lama dan Orde Baru menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila seharusnya menjadi panduan bagi pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera, bukan sekadar alat untuk legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, perlu adanya refleksi dan kritik terhadap penerapan Pancasila dalam konteks politik dan sosial. Kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus terus ditanamkan. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses politik, serta untuk menyuarakan pendapat dan kritik. Hanya dengan cara ini, Pancasila dapat kembali ke jalur yang benar, sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Di era modern ini, tantangan baru muncul dalam interpretasi Pancasila. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membawa dampak yang signifikan terhadap cara masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk aktif mengkaji dan merefleksikan apa arti Pancasila dalam konteks zaman sekarang.

Selain itu penting juga untuk menyadari bahwa Pancasila bukanlah nilai yang statis. Ia harus terus diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila dapat tetap relevan dan berfungsi sebagai landasan moral bagi bangsa Indonesia, tanpa terjebak dalam kepentingan politik tertentu. Dalam proses ini, pendidikan menjadi salah satu kunci untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Melalui pendidikan yang baik, nilai-nilai Pancasila dapat diajarkan secara komprehensif, sehingga generasi mendatang dapat memahami dan menerapkannya dengan benar. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi jargon politik, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Akhirnya, perjalanan Pancasila sebagai ideologi bangsa menunjukkan betapa pentingnya menjaga komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Masyarakat harus terus berjuang untuk menegakkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil, sesuai dengan semangat Pancasila. Hanya dengan cara ini, Pancasila dapat berfungsi sebagai panduan yang efektif untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dampak Penerapan Pancasila dan UUD 1945 Terhadap Hak Asasi Manusia

Penerapan Pancasila dan UUD 1945 di Indonesia memiliki dampak mendalam terhadap hak asasi manusia. Sejak masa Orde Lama, meskipun ada pengakuan terhadap hak-hak dasar, pelaksanaannya seringkali terhambat oleh ketidakstabilan politik. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi sering kali dibatasi, sehingga kritik terhadap pemerintah bisa berujung pada penangkapan dan tindakan represif lainnya. Pada masa ini, pemerintah lebih memilih untuk menjaga stabilitas politik daripada menghormati hak asasi manusia. Situasi ini menciptakan iklim ketakutan di kalangan masyarakat, di mana orang-orang enggan untuk mengungkapkan pendapat mereka. Dalam konteks ini, Pancasila seharusnya berfungsi sebagai landasan moral untuk melindungi hak-hak individu, tetapi sering kali disalah artikan untuk menghalangi kebebasan berekspresi.

Memasuki era Orde Baru, fokus pemerintah pada pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial mengabaikan hak asasi manusia. Pancasila dijadikan justifikasi untuk membungkam suara-suara yang dianggap mengancam kestabilan. Banyak pelanggaran hak

asasi manusia terjadi, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan hilangnya orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Sebagai respons terhadap pelanggaran ini, muncul berbagai gerakan sosial yang memperjuangkan hak asasi manusia. Aktivis dan organisasi masyarakat sipil berusaha untuk menuntut keadilan dan transparansi. Namun, upaya mereka seringkali dihadapkan pada penindasan dan intimidasi dari pihak yang berwenang.

Amandemen UUD 1945 pada akhir 1990-an menjadi titik balik dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Penambahan pasal-pasal yang mengatur hak-hak individu dan kebebasan sipil menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya perlindungan hak asasi. Ini memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara hukum. Dengan amandemen tersebut, masyarakat mulai memiliki ruang lebih untuk bersuara dan berorganisasi. Mereka dapat mengajukan gugatan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi masih tetap ada.

Masyarakat sipil yang semakin berkembang menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya hak asasi manusia. Namun, hambatan-hambatan seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih mengganggu penegakan hak-hak tersebut. Banyak kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti, menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat. Penting untuk diingat bahwa hak asasi manusia bukan hanya sekedar jargon, melainkan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 harus diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai bagian dari masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk terus memperjuangkan hak-hak kita. Pendidikan tentang hak asasi manusia perlu ditanamkan sejak dini agar generasi mendatang lebih paham dan sadar akan hak-hak mereka. Selain itu, dukungan terhadap organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak asasi manusia juga sangat penting. Di era modern ini, teknologi informasi memberikan peluang baru untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarluaskan informasi dan mengorganisir gerakan. Namun, di sisi lain, teknologi juga bisa disalahgunakan untuk mengawasi dan membungkam suara-suara yang kritis. Dalam konteks global, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia. Kerjasama dengan organisasi internasional dan negara lain dapat memperkuat upaya perlindungan hak asasi manusia di dalam negeri. Ini juga termasuk komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang belum terpecahkan.

Secara keseluruhan, penerapan Pancasila dan UUD 1945 terhadap hak asasi manusia menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Komitmen dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Kedepannya, penting bagi kita untuk terus berjuang agar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan cara ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan menghormati hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

Relevansi Pancasila dan UUD 1945 dalam Konteks Pemerintahan Saat Ini

Dalam konteks pemerintahan saat ini, Pancasila dan UUD 1945 tetap relevan sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa diharapkan dapat menjadi jalan untuk mencapai persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Namun, tantangan globalisasi dan modernisasi seringkali menguji

nilai-nilai tersebut. UUD 1945, setelah mengalami amandemen, memberikan kerangka hukum yang lebih demokratis. Saat ini, ada kesadaran yang lebih besar terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik. Pemilu yang lebih terbuka dan transparan menunjukkan adanya kemajuan, meskipun masih ada tantangan dalam hal integritas dan keadilan.

Relevansi Pancasila juga terlihat dalam upaya pemerintah untuk menghadapi isu-isu sosial, seperti kesenjangan ekonomi dan hak asasi manusia. Pancasila diharapkan dapat menjadi panduan dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila seringkali terhambat oleh praktik politik yang tidak konsisten. Penting bagi masyarakat untuk terus berpegang pada nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan Pancasila harus ditanamkan sejak dini untuk membentuk karakter bangsa yang menghargai keberagaman dan keadilan. Selain itu, penguatan lembaga-lembaga yang mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia juga sangat diperlukan.

Secara keseluruhan, Pancasila dan UUD 1945 tetap memiliki tempat dalam konteks pemerintahan saat ini. Keduanya harus diimplementasikan secara konsisten agar Indonesia dapat mencapai cita-citanya sebagai negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun secara yuridis formal ditetapkan sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi, mengalami dinamika interpretasi dan implementasi yang kompleks sepanjang sejarah politik Indonesia, khususnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama, Pancasila tampil sebagai simbol perjuangan nasional dan identitas bangsa pascakolonial. Ia dijadikan fondasi ideologis dalam membangun solidaritas, semangat antikolonialisme, dan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai luhur tersebut sering dikompromikan demi kepentingan politik kekuasaan. Kebijakan yang diterapkan cenderung otoriter, menekan kebebasan sipil, dan menyuburkan sentralisasi kekuasaan. UUD 1945 pun dimaknai secara fleksibel, bahkan manipulatif, untuk mendukung struktur pemerintahan yang kuat dan terpusat di tangan eksekutif, terutama melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menghidupkan kembali UUD 1945 tanpa proses demokratis.

Memasuki masa Orde Baru, situasi serupa terulang dalam pola yang lebih sistematis dan terstruktur. Pancasila tidak lagi sekadar dasar negara, tetapi dijadikan asas tunggal dalam kehidupan politik dan sosial, yang berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan negara. Dalam kerangka pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional, pemerintah memposisikan diri sebagai penjaga tunggal nilai-nilai Pancasila, sekaligus membatasi ruang partisipasi politik rakyat. Kritik dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi negara, dan kebebasan berekspresi ditekan melalui regulasi yang represif. Di saat yang sama, UUD 1945 tetap dipertahankan tanpa perubahan berarti selama lebih dari tiga dekade, sehingga memperkuat dominasi kekuasaan eksekutif dan melemahkan fungsi kontrol dari legislatif dan yudikatif. Hal ini berdampak pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan sosial, serta hilangnya akuntabilitas pemerintahan.

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pascareformasi menjadi titik balik penting dalam demokratisasi sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen tersebut memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk pembatasan kekuasaan, penguatan lembaga negara, serta pengakuan terhadap hak-hak warga negara. Meski demikian, tantangan tetap muncul dalam bentuk ketidakkonsistenan implementasi nilai-nilai konstitusional dan ideologis di lapangan. Masih terjadi praktik politik yang koruptif, penggunaan ideologi negara secara

simbolik tanpa substansi, serta rendahnya literasi politik masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak bersifat statis, melainkan terbuka terhadap dinamika interpretasi yang dipengaruhi oleh konteks politik, sosial, dan ekonomi. Keduanya dapat menjadi alat pembebasan maupun penindasan, tergantung pada bagaimana ia diinterpretasikan dan dijalankan oleh penguasa. Untuk itu, penting bagi seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat sipil, untuk menjaga kemurnian nilai-nilai Pancasila dan menjadikan UUD 1945 sebagai instrumen yang benar-benar berpihak pada keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Hanya melalui komitmen kolektif dan kesadaran kritis, cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Hatta, M. (2001). *Pancasila dan UUD 1945 dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Penerbit Lestari.
- Lestari, R. (2022). "Peran Pancasila dalam Membangun Kesadaran Berbangsa." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1).
- Notonegoro, J. (1993). *Pancasila sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Pertiwi, H., Putri, S. H., Salwa, D. N., Ariandini, C., & Aurora, P. A. (2023). Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi. Dalam *Seminar Nasional & Call for Paper HUBISINTEK 2023*. Universitas 'Aisyiyah Surakarta.
- Prasetyo, E. (2019). "Dampak Amandemen UUD 1945 terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3).
- Rahardjo, S. (2015). *Pancasila dalam Konteks Global*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Sari, D. (2020). "Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Konteks Modern." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2).
- Setiawan, B. (2021). "Pancasila dan UUD 1945: Relevansi dalam Era Demokrasi." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(2).
- Sihombing, A. (2010). *Reformasi dan Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Soekarno. (1965). *Pancasila: Dasar Filsafat Negara*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Wibowo, A. (2018). "Interpretasi Pancasila dalam Kebijakan Publik di Era Reformasi." *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1).